



Judul : Golkar peringatkan perjanjian dengan Singapura
Tanggal : Jumat, 04 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Golkar Peringatkan Perjanjian dengan Singapura

PERJANJIAN antara pemerintah Indonesia dan Singapura terkait dengan ekstradisi dan pertahanan penataan ruang udara (*flight information region*/FIR) perlu dilihat secara terpisah. Perjanjian ekstradisi yang menguntungkan pemerintah hanyalah salah satu poin dalam keseluruhan perjanjian RI-Singapura sehingga diperlukan pendalaman.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengemukakan hal itu, kemarin. Ia merespons pro dan kontra atas perjanjian FIR dengan Singapura bersamaan dengan tercapainya kesepa-

katan ekstradisi.

“Kita harus memahami bahwa ekstradisi hanyalah satu poin dari berbagai pokok perjanjian lainnya, seperti pertahanan dan manajemen ruang udara, sehingga kita perlu mendalami betul poin-poin lain yang menjadi pokok dari perjanjian RI-Singapura,” ungkap Nurul di Jakarta, kemarin.

Pada prinsipnya, Nurul menjelaskan partainya mendukung penuh perjanjian RI-Singapura terkait dengan ekstradisi. Dengan ekstradisi, pemerintah tetap bisa melakukan upaya hukum terhadap para pelaku kejahatan yang bersembunyi di

luar wilayah kedaulatan NKRI.

Ia mengingatkan poin-poin perjanjian RI-Singapura saling mengikat. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk melihat secara menyeluruh potensi-potensi keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia.

“Kita harus mengukur, apakah perjanjian pertahanan dan pokok perjanjian lainnya sepadan dengan keuntungan yang Indonesia dapat dengan memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura,” tutur Nurul.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai Singapura

mengecoh Indonesia. Seharusnya FIR itu dikelola Indonesia dalam ketinggian berapa pun.

Ternyata, Singapura masih bisa mendapat kontrol wilayah ketinggian 0-37 ribu kaki. Kecerdikan Singapura, menurut Hikmahanto, ialah memaketkan perjanjian FIR dengan perjanjian pertahanan dan ekstradisi.

Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto memastikan Indonesia mendapatkan banyak keuntungan dari perjanjian dengan Singapura. Indonesia tidak perlu lagi mengantongi izin terbang di atas wilayah Natuna. “Patroli, termasuk pesawat Bea Cukai. Kerahasiaan, keamanan ditanggung kita sendiri, tidak perlu memberitahukan negara lain.” (Uta/Cah/Ins/P-2)